

**Analisis Persepsi Wisatawan Tentang Peran Stakeholder
Terkait Mitigasi Bencana di Destinasi Wisata Kabupaten Aceh Jaya**

**Yusnaidi^a, Mirdha Fahlevi SI^b, Muhammad Rahmat Hidayat^c
^{a,b,c} Jurusan Manajemen, Universitas Teuku Umar**

Corresponding Author : yusnaidi@utu.ac.id

ABSTRACT

The development of tourist areas, especially natural tourism, cannot be separated from disaster mitigation programs. The alignment of tourist destination development with disaster mitigation programs will have an impact on comfort, positive perceived risk and also the sustainability of a tourist destination. Understanding tourists' perspectives on the role of stakeholders in disaster mitigation programs and tourists' expectations of disaster mitigation in tourist destinations has an important value for the development of tourist destinations based on tourist needs. In addition, the suitability between reality in tourist destinations and tourist expectations has a significant effect on tourist satisfaction and the decision to choose a tourist destination and their decision to visit again. The research results show that tourists expect to increase and strengthen the role of stakeholders to implement disaster mitigation programs in tourist destinations in Aceh Jaya Regency.

Keywords: Tourism, disaster mitigation, stakeholder roles

ABSTRAK

Pengembangan kawasan wisata, khususnya wisata alam, tidak bisa dipisahkan dari program mitigasi bencana. Keselarasan pembangunan destinasi wisata dengan program mitigasi bencana akan berdampak pada kenyamanan, *positive perceived risk* dan juga keberlanjutan dari suatu destinasi wisata. Memahami persepektif wisatawan terhadap peran stakeholder dalam program mitigasi bencana serta harapan wisatawan terhadap mitigasi bencana di destinasi wisata memiliki nilai penting bagi pengembangan destinasi wisata yang berbasis kebutuhan wisatawan. Selain itu kesesuaian antara realita di destinasi wisata dengan harapan wisatawan berpengaruh signifikan pada kepuasan wisatawan dan keputusan memilih destinasi wisata serta keputusan mereka untuk berkunjung kembali. Hasil riset menunjukkan bahwa para wisatawan berharap adanya peningkatan dan penguatan peran *stakeholder* untuk mengimplementasikan program mitigasi bencana di destinasi wisata di Kabupaten Aceh Jaya.

Kata Kunci: Pariwisata, mitigasi bencana, peran *stakeholder*

PENDAHULUAN

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui perspektif wisatawan akan peran *stakeholder* pariwisata dalam melakukan upaya mitigasi bencana di berbagai destinasi wisata di Kabupaten Aceh Jaya. Hasil penelitian ini akan memperkuat pemahaman terhadap perilaku wisatawan dalam memandang peran *stakeholder* dan mengetahui harapan para wisatawan terhadap peran para *stakeholder* terkait.

Para wisatawan, pelaku industri wisata dan masyarakat secara umum menyadari pentingnya ketahanan terhadap potensi bencana termasuk di destinasi wisata. Namun demikian kesadaran ini tidak selalu terwujud dalam implementasi di lapangan. Hal ini berimbas pada *image negative* yang muncul terhadap destinasi wisata tersebut karena besarnya potensi bencana yang mungkin terjadi dan tidak adanya upaya mitigasi.

Lokasi wisata yang aman, nyaman dan berkelanjutan adalah kondisi ideal yang diharapkan oleh semua pihak terutama para wisatawan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah, masyarakat dan pelaku wisata, untuk menghadirkan destinasi wisata yang nyaman dan tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Pemenuhan harapan para wisatawan berhubungan erat dengan kepuasan pengunjung saat berwisata. Hal ini juga berdampak pada terstrukturnya upaya pengembangan pariwisata yang berbasis pada kebutuhan wisatawan. Meminimalisir resiko mengunjungi destinasi wisata adalah sebuah kebutuhan yang berpotensi besar mempengaruhi keputusan pemilihan destinasi wisata dan keputusan berkunjung kembali.

Iniilah yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi wisatawan terhadap peran pemerintah, tokoh masyarakat dan kelompok sadar wisata dalam memitigasi potensi bencana di destinasi wisata. Dalam konteks ini potensi bencana berupa bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam adalah kejadian umum, dan pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang paling rentan terhadap dampaknya (Brown, Rovins, Feldmann-Jensen, Orchiston, & Johnston, 2017). Dalam hal ini, kerentanan mengacu pada “sejauh mana komunitas, sistem, atau aset rentan terhadap efek merusak dari bahaya tertentu” (Becken & Khazai, 2017, hlm. 97). Dalam konteks tujuan manajemen, lokasi fisik sebuah destinasi wisata menentukan jenis bahaya yang rentan terhadapnya dan tingkat kerusakan dari bahaya dapat ditimbulkan. Menurut definisi, bahaya memiliki potensi untuk menyebabkan suatu kerusakan atau kerugian, dan ketika kerugian ini dikaitkan dengan risiko dan kerentanan, bahaya disebut sebagai bencana (Coppola, 2015).

Kondisi fisik sebuah destinasi juga menghadirkan perspektif dan penilaian dari para wisatawan terhadap kelayakan untuk mengunjungi sebuah destinasi dan juga berhubungan dengan persepsi tentang resiko. Persepsi tentang resiko berkunjung ke sebuah destinasi dimaknai sebagai evaluasi atas situasi dan kondisi destinasi wisata berkaitan dengan resiko saat memutuskan mengunjungi destinasi tersebut atau mengkonsumsi produk-produk wisata (Neuburger and Egger, 2021).

Berdasarkan undang-undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Sementara itu bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Adapun bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Merujuk ke situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2021), Secara umum, rencana mitigasi untuk menyatukan persepsi bahwa pengembangan kawasan wisata, khususnya wisata alam, tidak bisa dipisahkan dari program mitigasi bencana. Selain itu, pengembangan kawasan wisata tanpa menyiapkan mitigasi bencana berakibat pada meningkatnya resiko atau potensi dampak kerugian dan korban akibat bencana pada masa

yang mendatang. Tata ruang adalah instrumen penting guna mengelola dan meminimalisir risiko bencana tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap wilayah atau destinasi wisata untuk memiliki perencanaan pengembangan pariwisata tangguh bencana yang dianalisis berdasarkan kerentanan masing-masing wilayah.

KAJIAN PUSTAKA

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana melalui serangkaian langkah yang diambil sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi (Bhaskara, 2022; Granville et al., 2016). Tujuan utama dari mitigasi bencana adalah untuk melindungi nyawa dan harta benda masyarakat serta mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh bencana (Gabbe et al., 2022; Nugraheni et al., 2022). Mitigasi bencana dapat terkait pada proses pemetaan risiko bencana, perencanaan darurat, peningkatan infrastruktur, edukasi dan pelatihan serta rencana pemulihan atas sebuah bencana yang telah dan mungkin terjadi (Lan Huong et al., 2022; Yodsuban & Nuntaboot, 2021).

Perlu keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam meminimalisir potensi risiko bencana terhadap industri pariwisata. Salah satu pendekatan teoritis dalam isu ini adalah Tourism Incident Management System (TIMS). TIMS adalah sistem manajemen insiden yang didesain khusus untuk mengatasi kejadian-kejadian yang berpotensi merusak industri pariwisata (Dwivedi et al., 2023; Mandić & Kennell, 2021). Sistem ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari kejadian tersebut terhadap pariwisata dan menjaga reputasi destinasi wisata.

TIMS terdiri dari sejumlah prosedur dan protokol yang harus diikuti dalam menghadapi kejadian-kejadian yang berpotensi merusak industri pariwisata, seperti bencana alam, serangan teroris, kejahatan, dan lain sebagainya. Sistem ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, operator pariwisata, pelaku usaha, dan masyarakat setempat. Sebagai bagian dari TIMS, terdapat juga sistem yang disebut sebagai Incident Response System (IRS) (Bhaskara, 2022). IRS merupakan komponen TIMS yang mengatur tentang respons terhadap sebuah insiden atau kejadian. IRS biasanya terdiri dari empat tahap yaitu: identifikasi, evaluasi, respons, dan pemulihan.

Tahap identifikasi melibatkan pengumpulan informasi tentang kejadian dan analisis terhadap situasi saat itu. Tahap evaluasi melibatkan penilaian terhadap dampak kejadian terhadap industri pariwisata dan destinasi wisata secara keseluruhan (Becken & Hughey, 2013; Ren et al., 2021). Tahap respons melibatkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi kejadian dan meminimalkan dampak negatifnya (Becken & Hughey, 2013; Morakabati et al., 2017). Tahap pemulihan melibatkan upaya untuk mengembalikan kondisi industri pariwisata dan destinasi wisata seperti semula setelah kejadian terjadi (Magano et al., 2023).

Adapun resiliensi menekankan pada aspek pentingnya membangun kemampuan individu, kelompok, dan komunitas untuk dapat pulih dan beradaptasi setelah terjadinya bencana (Dwivedi et al., 2023; Mandić & Kennell, 2021). Penerapan konsep ini di tempat wisata meliputi peningkatan ketersediaan sumber daya, dukungan psikologis, serta pembangunan infrastruktur yang tahan bencana (Lan Huong et al., 2022; Paul et al., 2022).

Reliensi juga terkait dengan perspektif perilaku yang berusaha memprediksi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia, termasuk dalam situasi bencana (Bhaskara & Filimonau, 2021; Lan Huong et al., 2022). Penerapan teori ini di tempat wisata meliputi penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang risiko bencana, penggunaan simbol dan tanda peringatan yang mudah dimengerti, serta peningkatan kesadaran dan kesiapan pengunjung. Konsep risiliensi dapat diartikan sebagai kemampuan individu, kelompok, atau komunitas untuk tetap bertahan, beradaptasi, dan pulih dari stresor atau trauma yang melibatkan kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengatasi tantangan dan situasi stres yang kompleks (Bhaskara & Filimonau, 2021; Dwivedi et al., 2023).

Risiliensi juga melibatkan kemampuan untuk memperoleh sumber daya yang memadai dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Salah satu pendekatan mitigasi bencana berbasis resiliensi adalah dengan membangun kapasitas individu, kelompok, dan komunitas dalam menghadapi bencana (Bhaskara & Filimonau, 2021; Nugraheni et al., 2022). Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana, memberikan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana, dan mengembangkan jaringan sosial dan dukungan psikososial yang kuat. Peningkatan kapasitas ini dapat membantu masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperkuat kemampuan mereka untuk pulih setelah terjadinya bencana (Gabbe et al., 2022; Psaroudakis et al., 2021; Yodsuban & Nuntaboot, 2021). Faktor-faktor ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi mitigasi bencana yang lebih holistik dan terintegrasi seperti faktor individu, faktor keluarga, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor lingkungan (Bhaskara, 2022; Robertson et al., 2006). Misalnya, dalam membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, strategi yang efektif adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi risiliensi, seperti kebutuhan individu, dukungan sosial, dan lingkungan fisik yang aman (Nugraheni et al., 2022; Yodsuban & Nuntaboot, 2021).

Dalam proses edukasi mitigasi bencana di lokasi wisata, teori resiliensi dapat menjadi landasan untuk mengembangkan strategi yang lebih holistik dan terintegrasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat (Gabbe et al., 2022). Sementara itu, teori perilaku dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana dan bagaimana merubah perilaku tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak bencana (Brodmerkel et al., 2020; Lan Huong et al., 2022). Kombinasi dari kedua teori ini dapat membantu mengembangkan strategi edukasi mitigasi bencana yang lebih efektif dan terukur di lokasi wisata, sehingga masyarakat dapat lebih siap dan mampu menghadapi bencana serta memperkuat kemampuan untuk pulih dan beradaptasi setelah terjadinya bencana (Bhaskara, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan aplikasi metode *cross sectional* untuk pengumpulan data. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wisatawan terhadap peran stakeholder serta harapan mereka terhadap berbagai upaya mitigasi bencana di destinasi wisata di Kabupaten Aceh Jaya..

Kegiatan survey dilaksanakan mulai bulan Desember 2022 hingga Januari 2023. Populasi dari penelitian ini adalah mereka yang pernah berkunjung ke salah satu destinasi

wisata di Kabupaten Aceh Jaya. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan mengaplikasikan *convenience sampling technic*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Total wistawan yang menjadi responden dalam kegiatan survey ini adalah sebanyak 135 orang. Tabel berikut ini menyajikan profil responden berdasarkan jenis kelamin dan usia. Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki berjumlah sebanyak 60 orang dan responden perempuan sebanyak 75 orang. Secara lebih rinci, sebaran responden berdasarkan usia dan jenis kelamin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tabulasi Silang Profil Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Perempuan	Laki-Laki	
18 s.d 27 Tahun	60	31	91
28 s.d 37 Tahun	13	20	33
38 s.d 47 Tahun	2	7	9
48 s.d 57 Tahun	0	2	2
Total	75	60	135

Sumber : Hasil Analisis Data (2023)

Berdasarkan jenjang pendidikan, para responden tersebar dalam beberapa jenjang pendidikan terakhir yaitu SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, diploma, sarjana/ magister dan doktoral. Secara lebih rinci, profil responden disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Tabulasi Silang Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Perempuan	Laki-Laki	
SMP/ Sederajat	0	1	1
SMA/ Sederajat	36	19	55
Diploma	0	1	1
Sarjana	26	16	42
Magister	13	22	35
Doktoral	0	1	1
Total	75	60	135

Sumber : Hasil Analisis Data (2023)

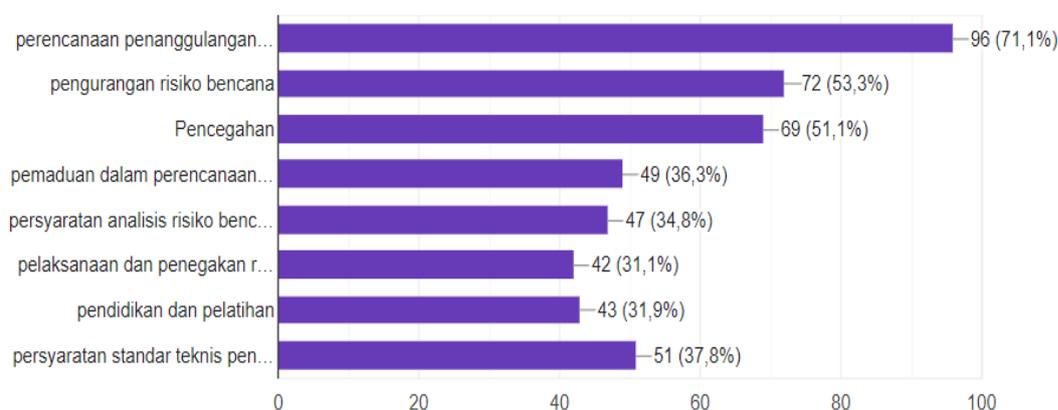
Penelitian ini menelaah persepsi wisatawan tentang peran stakeholder utama dalam mengupayakan hadirnya mitigasi bencana di destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Aceh Jaya. Dikarenakan efek krusial peran yang diemban, maka pada bagian ini, para responden memberi jawaban terhadap peran para pemangku kepentingan terkait upaya pengurangan potensi bencana di destinasi wisata. Adapun persepsi tentang bencana merujuk pada tiga jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Terdapat tiga pemangku kepentingan yang dianggap dapat berperan penting yaitu pemerintah, pemuka masyarakat dan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pada bagian berikut ini kami akan menyajikan harapan para wisatawan terhadap peran pemangku kepentingan

terkait dalam upaya mereduksi potensi bencana pada destinasi wisata di Kabupaten Aceh Jaya.

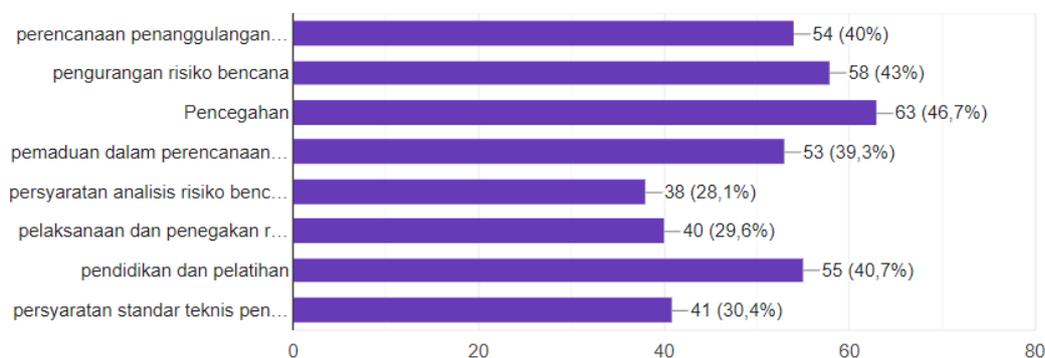
Peran Pemerintah

Hasil survei menunjukkan bahwa peran pemerintah yang paling diharapkan oleh para responden untuk mengurangi potensi bencana alam di destinasi wisata adalah perencanaan penanggulangan. Pada posisi kedua terbanyak adalah pengurangan risiko bencana dan pada posisi ketiga adalah pencegahan. Secara lebih rinci, peran pemerintah yang diharapkan oleh para responden adalah sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 1: Peran Pemerintah dalam Mereduksi Potensi Bencana Alam

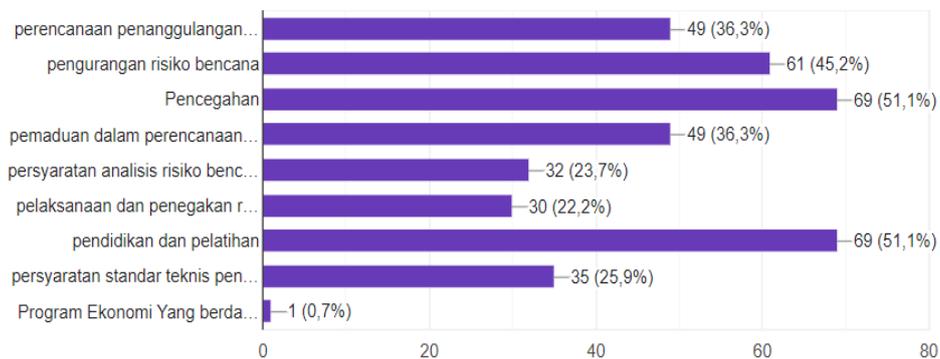
Para responden juga memberi pendapatnya tentang peran pemerintah dalam pengurangan potensi bencana non alam pada destinasi wisata di Aceh Jaya. Peran pemerintah yang paling diharapkan adalah pencegahan, pengurangan risiko bencana dan perencanaan penanggulangan. Semua peran yang tertera dalam kuesioner mendapat respon yang relatif seimbang dari para responden. Secara lebih rinci, peran pemerintah yang diharapkan oleh para wisatawan adalah sebagai berikut



Gambar 2: Peran Pemerintah dalam Mereduksi Potensi Bencana Non Alam

Selanjutnya, peran pemerintah yang diharapkan dalam mereduksi bencana sosial yang paling diharapkan adalah pendidikan dan pelatihan serta pencegahan. Kedua peran tersebut berada pada posisi teratas. Selanjutnya, pada posisi ketiga disusul oleh pengurangan risiko

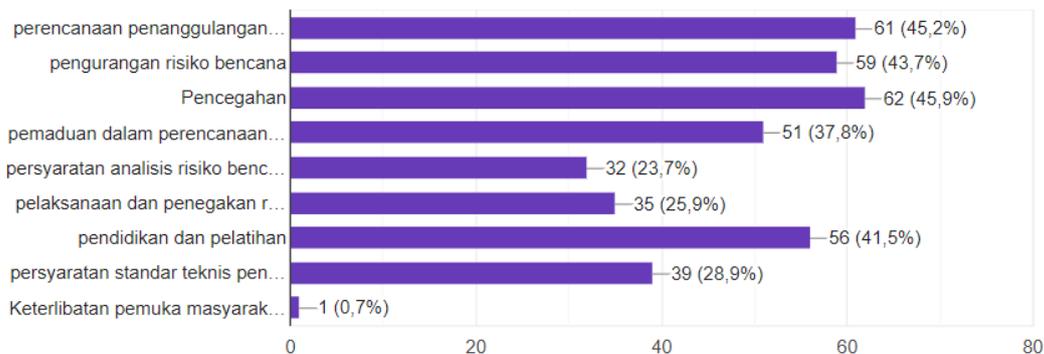
bencana. Secara lebih lengkap, peran pemerintah yang diharapkan oleh para responden untuk mereduksi bencana sosial disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 3: Peran Pemerintah dalam Mereduksi Potensi Bencana Sosial

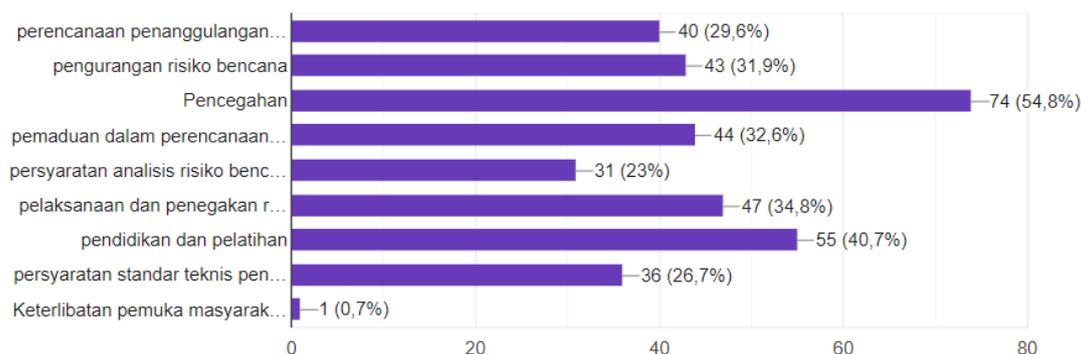
Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat juga dianggap potensial dalam mereduksi potensi bencana di kawasan destinasi wisata. Peran tokoh masyarakat yang sangat diharapkan oleh para wisatawan adalah berupa pencegahan. Pada posisi kedua adalah perencanaan penanggulangan. Kemudian, pada posisi berikutnya adalah pengurangan risiko bencana. Secara lebih rinci, peran tokoh masyarakat yang diharapkan oleh para wisatawan adalah sebagai berikut :



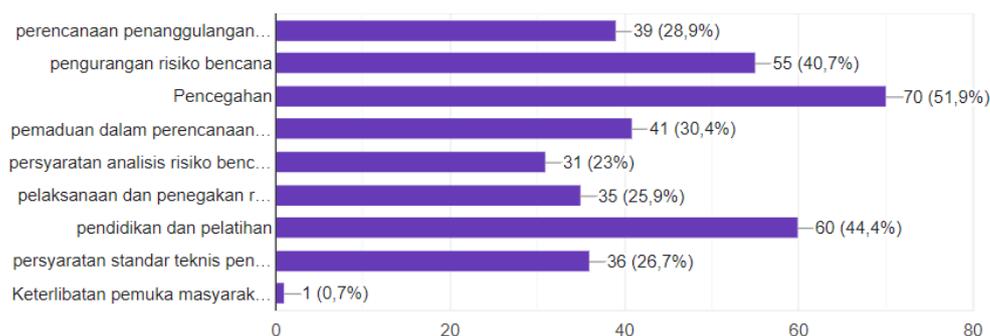
Gambar 4 : Peran Tokoh Masyarakat dalam Mereduksi Potensi Bencana Alam

Selanjutnya, peran pemuka masyarakat yang diharapkan oleh para responden untuk mereduksi potensi bencana non alam adalah pencegahan. Peran ini relatif lebih dominan dibandingkan dengan berbagai peran lainnya. Sedangkan peran lainnya relatif mendapat peran yang seimbang pada angka antara 30 hingga 50 persen. Secara lebih rinci, peran tokoh masyarakat yang diharapkan oleh para responden untuk mereduksi potensi bencana non alam disajikan dalam gambar berikut ini



Gambar 5 : Peran Tokoh Masyarakat dalam Mereduksi Potensi Bencana Non Alam

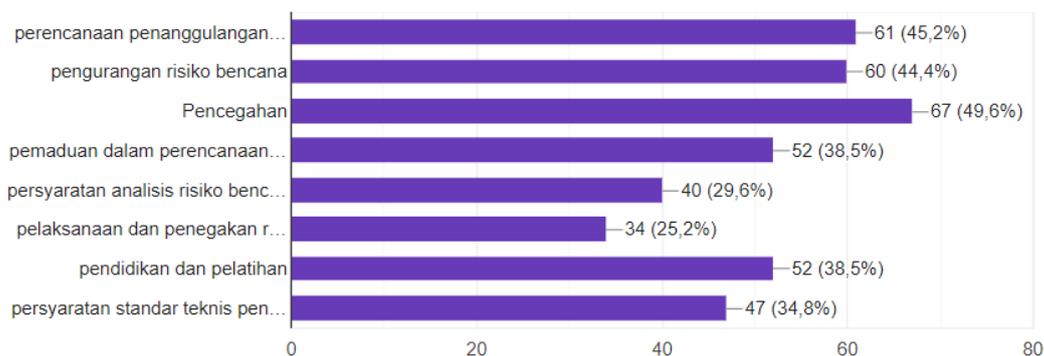
Peran masyarakat yang diharapkan untuk mereduksi potensi bencana sosial adalah pada peran pencegahan. Peran ini berada pada urutan pertama. Selanjutnya, peran lainnya yang diharapkan adalah pada aspek pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, pada posisi ketiga adalah pengurangan risiko bencana. Secara lebih lengkap, peran pemuka masyarakat dalam mereduksi potensi bencana sosial adalah sebagai berikut :



Gambar 6 : Peran Tokoh Masyarakat dalam Mereduksi Potensi Bencana Sosial

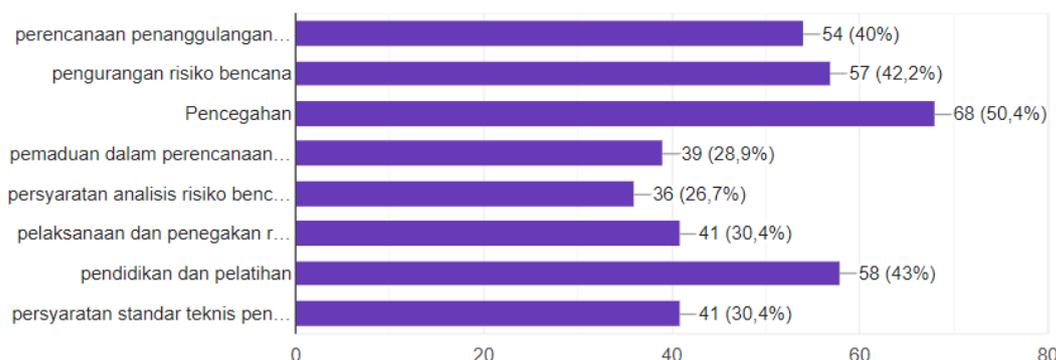
Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kelompok sadar wisata (pokdarwis) juga berperan penting dalam rangka mereduksi potensi bencana yang terjadi pada berbagai destinasi wisata. Pada aspek pengurangan potensi risiko bencana alam, peran pokdarwis yang diharapkan adalah aspek pencegahan. Selanjutnya, pokdarwis juga diharapkan perannya dalam melakukan perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih lengkap, peran pokdarwis yang diharapkan oleh para wisatawan yang menjadi responden dalam kegiatan survey ini adalah sebagai berikut:



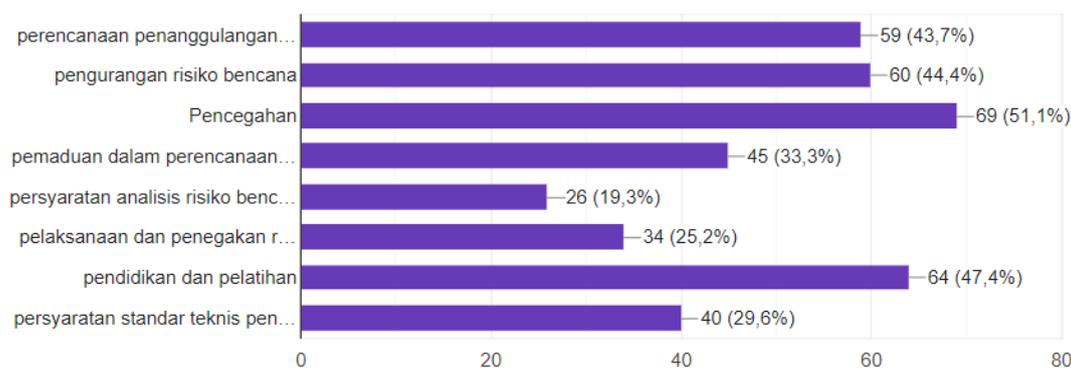
Gambar 7 : Peran Pokdarwis dalam Mereduksi Potensi Bencana Alam

Selanjutnya, peran pokdarwis juga diharapkan untuk melakukan upaya pengurangan potensi bencana non alam. Peran yang sangat diharapkan oleh responden adalah pada aspek pencegahan. Selanjutnya pada posisi kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Adapun peran dalam pengurangan risiko yang terdampak akibat bencana dan perencanaan penanggulangan bencana masing-masing berada pada posisi ketiga dan keempat. Secara lebih rinci, peran pokdarwis yang diharapkan oleh para responden adalah sebagai berikut :



Gambar 8 : Peran Pokdarwis dalam Mereduksi Potensi Bencana Non Alam

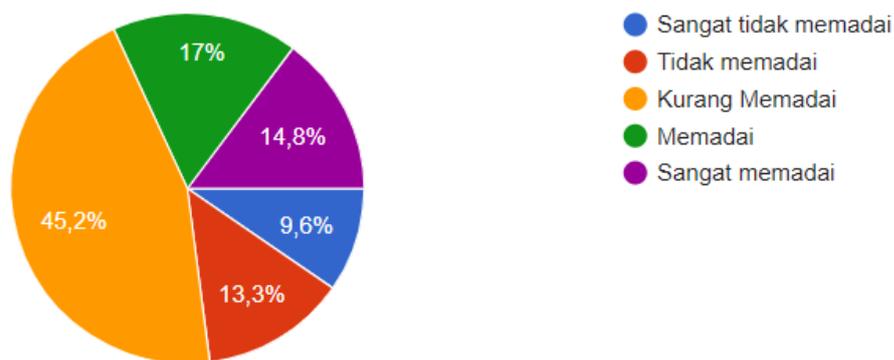
Berikutnya, peran pokdarwis yang sangat diharapkan dalam mereduksi potensi bencana sosial adalah pada aspek pencegahan. Selanjutnya pada posisi kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Secara lebih rinci, peran pokdarwis yang diharapkan dalam mereduksi potensi bencana sosial adalah sebagai berikut



Gambar 9 : Peran Pokdarwis dalam Mereduksi Potensi Bencana Sosial

Kegiatan survey ini juga melihat persepsi para responden terhadap ketersediaan informasi keselamatan pengunjung di berbagai destinasi wisata di Kabupaten Aceh Jaya. Ketersediaan informasi keselamatan pengunjung merupakan komponen penting yang dapat memberi panduan kepada para wisatawan apabila terjadinya bencana di destinasi wisata.

Berdasarkan hasil survey, para responden beranggapan bahwa ketersediaan informasi keselamatan pengunjung masih perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan terkait bidang kepariwisataan di Aceh Jaya. Sebanyak 45,2 persen responden menyebutkan bahwa ketersediaan informasi keselamatan pengunjung kurang memadai. Sebanyak 13,3 persen memberi tanggapan bahwa ketersediaan informasi keselamatan pengunjung tidak memadai serta 9,6 persen mengatakan bahwa sangat tidak memadai. Selanjutnya, sebanyak 17 persen beranggapan bahwa ketersediaan informasi keselamatan pengunjung telah memadai. Adapun sisanya sebanyak 14,8 persen beranggapan bahwa ketersediaan informasi keselamatan pengunjung sangat memadai. Secara lebih lengkap, tanggapan responden terhadap ketersediaan informasi keselamatan pada destinasi wisata adalah sebagai berikut:



Gambar 10: Persepsi Responden Tentang Ketersediaan Informasi Keselamatan Pengunjung

LIMITATIONS DAN SARAN UNTUK PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah responden yang relatif terbatas. Untuk memperkuat pemahaman terhadap perspektif wisatawan akan peran *stakeholder* dalam mitigasi bencana di destinasi wisata, riset selanjutnya perlu memperluas cakupan lokasi riset dan meningkatkan jumlah responden. Selain itu riset selanjutnya dalam memfokuskan diri pada kelompok wisatawan tertentu seperti hanya memfokuskan unit analisis pada generasi Y atau generasi Z saja, sehingga hasil riset menjadi lebih tajam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhaskara, G. I. (2022). Lesson Learned: Shaping Collaboration Among Tourism Stakeholders During Mount Agung Eruption. *E-Journal of Tourism*, 9(1), 113. <https://doi.org/10.24922/eot.v9i1.85470>
- Becken, S., & Khazai, B. (2017). Resilience, tourism and disaster. In R. W. Butler (Ed.), *Tourism and resilience* (pp. 96–104). Oxfordshire: CABI. <https://doi.org/10.1079/9781780648330.0096>
- Brodmerkel, A., Carpenter, A. T., & Morley, K. M. (2020). Federal financial resources for disaster mitigation and resilience in the U.S. water sector. *Utilities Policy*,

- 63(January), 101015. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2020.101015>
- Brown, N. A., Rovins, J. E., Feldmann-Jensen, S., Orchiston, C., & Johnston, D. (2017). Exploring disaster resilience within the hotel sector: A systematic review of literature. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 22, 362–370. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.02.005>
- Coppola, D. P. (2015). *Introduction to international disaster management (3rd ed.)*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Dwivedi, Y. K., Akhter Shareef, M., Shakaib Akram, M., Tegwen Malik, F., Kumar, V., & Giannakis, M. (2023). An attitude-behavioral model to understand people's behavior towards tourism during COVID-19 pandemic. *Journal of Business Research*, 161(December 2022), 113839. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113839>
- Gabbe, B. J., Veitch, W., Mather, A., Curtis, K., Holland, A. J. A., Gomez, D., Civil, I., Nathens, A., Fitzgerald, M., Martin, K., Teague, W. J., & Joseph, A. (2022). Review of the requirements for effective mass casualty preparedness for trauma systems. A disaster waiting to happen? *British Journal of Anaesthesia*, 128(2), e158–e167. <https://doi.org/10.1016/j.bja.2021.10.038>
- Granville, F., Mehta, A., & Pike, S. (2016). Destinations, disasters and public relations: Stakeholder engagement in multi-phase disaster management. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 28, 73–79. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.02.001>
- Kemenparekraf. (2021)., “Mewaspadaai bencana di Destinasi Wisata”, <https://www.kemenparekraf.go.id/rumah-difabel/Mewaspadaai-Bencana-di-Destinas-Wisata . Diakses April 2023>.
- Lan Huong, T. T., Van Anh, D. T., Dat, T. T., Truong, D. D., & Tam, D. D. (2022). Disaster risk management system in Vietnam: progress and challenges. *Heliyon*, 8(10), e10701. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10701>
- Magano, J., Fraiz-Brea, J. A., & Ângela Leite. (2023). Dark tourism, the holocaust, and well-being: A systematic review. *Heliyon*, 9(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13064>
- Mandić, A., & Kennell, J. (2021). Smart governance for heritage tourism destinations: Contextual factors and destination management organization perspectives. *Tourism Management Perspectives*, 39(August). <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100862>
- Morakabati, Y., Page, S. J., & Fletcher, J. (2017). Emergency Management and Tourism Stakeholder Responses to Crises: A Global Survey. *Journal of Travel Research*, 56(3), 299–316. <https://doi.org/10.1177/0047287516641516>
- Neuburger, L. and Egger, R. (2021) ‘Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: a case study of the DACH region’, *Current Issues in Tourism*, 24(7), pp. 1003–1016. doi:10.1080/13683500.2020.1803807
- Nugraheni, I. L., Suyatna, A., Setiawan, A., & Abdurrahman. (2022). Flood disaster mitigation modeling through participation community based on the land conversion and disaster resilience. *Heliyon*, 8(8), e09889. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09889>
- Psaroudakis, C., Xanthopoulos, G., Stavrakoudis, D., Barnias, A., Varela, V., Gkotsis, I., Karvouniari, A., Agorgianitis, S., Chasiotis, I., Vlachogiannis, D., Sfetos, A.,

- Kaoukis, K., Christopoulou, A., Antakis, P., & Gitas, I. Z. (2021). Development of an early warning and incident response system for the protection of visitors from natural hazards in important outdoor sites in Greece. *Sustainability (Switzerland)*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/su13095143>
- Paul, S. K., Naim, J., & Mou, M. A. (2022). Assessing efficiency of disaster management institutions at local level in the coastal region of Bangladesh. *Nature-Based Solutions*, 2(February), 100024. <https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2022.100024>
- Ren, C., James, L., Pashkevich, A., & Hoarau-Heemstra, H. (2021). Cruise trouble. A practice-based approach to studying Arctic cruise tourism. *Tourism Management Perspectives*, 40, 100901. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100901>
- Robertson, D., Kean, I., & Moore, S. (2006). Tourism Risk Management: an Authoritative Guide To Managing Crises in Tourism. In *APEC International Centre for Sustainable Tourism (AICST)* (Issue December). <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Tourism+Risk+Management+An+Authoritative+Guide+to+Managing+Crises+in+Tourism#0%5Cnhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Tourism+risk+management:+an+authoritative+guide+t>
- Yodsuban, P., & Nuntaboot, K. (2021). Community-based flood disaster management for older adults in southern of Thailand: A qualitative study. *International Journal of Nursing Sciences*, 8(4), 409–417. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2021.08.008>